

DETERMINASI BELANJA MODAL DI 17 KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARATRafael Evan Pradityo¹⁾, Nurhayati²⁾, Syafri³⁾^{1) 2) 3)} 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Correspondence		
Email: syafri@trisakti.ac.id		No. Telp:
Submitted: 6 December 2023	Accepted: 14 December 2023	Published: 16 December 2023

ABSTRACT

“Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dampak atau pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di 17 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan belanja modal tertinggi kedua di seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan regresi data panel. Metode pemeriksaan 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan periode 2017-2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.”

Kata kunci: Sisa Anggaran; Dana Perimbangan; DAU; DAK; DBH; PAD;; Belanja Modal.

Pendahuluan

Di Indonesia, setiap wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten pasti memiliki rencana keuangan yang biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas Pemda sesuai dengan prinsip otonomi daerah. APBD berjalan secara tahunan, APBD mengatur Belanja modal diatur dengan Pedoman Penggunaan Rekening Pendapatan Belanja Pegawai, Barang dan Modal (No. PER-33/PB/2008).

Dengan dilaksanakannya desentralisasi secara menyeluruh berdasarkan perundangan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan UU No 25 Tahun 1999, setiap daerah memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, dan kepentingan rakyatnya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, semua kegiatan pemerintah daerah harus berkaitan dengan keuangan daerah, dan setiap kegiatan harus melibatkan arus masuk atau keluar netto dana. Keuangan daerah meliputi segala hak dan kewajiban yang diukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu tugas pemerintah adalah mendukung kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya. Menurut Mangkoesoebroto (Raharjo, 2006) pemerintah berperan dalam kegiatan ekonomi

Alokasi Belanja modal ini antara lain untuk penyediaan fasilitas atau barang publik, antara lain jalan, rehabilitasi jaringan irigasi, pertahanan dan keamanan. Alokasi ini dilimpahkan kepada daerah dan harus berpegang pada kewenangan alokasi belanja daerah atau APBD, seperti penyediaan infrastruktur sebagai sarana pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal belum mencapai hasil optimal yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah. Jika desentralisasi fiskal terus dilanjutkan dengan kebijakan dan formulasi yang sama, maka tujuan desentralisasi fiskal untuk mencapai pemerataan pembangunan nasional hanya akan tetap menjadi harapan yang belum terwujud, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022.

Berbagai pengamatan dilaksanakan untuk mengamati dampak pendapatan daerah terhadap pelaksanaan belanja modal. Dalam penelitian (Sugiarthi & Supadmi, 2014) ditemukan bahwa PAD, DAU, dan DBH menanggung pengaruh tinggi terhadap realisasi belanja modal. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan dampak yang bisa diabaikan. Demikian juga penelitian Sugiyanta (2016), DAK dan SiLPA dapat berpengaruh menguntungkan dalam meningkatkan belanja modal, namun DAU dan DBH tidak demikian.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jendral Perimbangan Kementerian Keuangan pada tahun 2017-2022 kami mengambil data belanja modal di 34 Provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1 Belanja Modal Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022

No	PROVINSI DI INDONESIA	REALISASI BELANJA MODAL						Rata2
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jawa Timur	20224	18572	21119	14474	14922	18515	17971.00
2	Jawa Barat	18525	17845	19634	14070	15530	14875	16746.50
3	Jawa Tengah	16075	15532	15513	9914	11377	13231	13606.99
4	DKI Jakarta	11045	14118	11551	3173	6865	8411	9193.83
5	Sumatera Utara	10887	9626	9604	7177	7371	9649	9052.33
6	Papua	9608	10130	9840	6401	7064	9464	8751.06
7	Sumatera selatan	7640	7869	10348	8710	9039	8485	8681.83
8	Sulawesi Selatan	8644	7832	7824	6812	6619	7052	7463.87
9	Aceh	8920	6320	8743	6395	6687	6641	7284.33
10	Kalimantan Timur	5343	7535	9344	7478	7428	6559	7281.22
11	Banten	7115	6926	6872	4279	5312	6276	6129.85
12	Papua Barat	4677	5297	6234	5680	5218	5289	5399.16
13	Riau	6133	4601	6202	4459	4331	5365	5181.83
14	Sulawesi Tenggara	4810	4530	5242	4359	5182	5560	4947.13
15	Lampung	6474	6167	4528	3513	3812	4255	4791.50
16	Kalimantan Barat	5466	4810	5092	3991	4671	4407	4739.44
17	Nusa Tenggara Timur	5040	4803	5293	4299	4044	4603	4680.37
18	Kalimantan Selatan	5034	4531	5790	4127	4401	3731	4602.32
19	Sumatera Barat	5126	4948	5232	3519	3237	3772	4305.67
20	Kalimantan Tengah	4588	4735	4841	3941	3811	3794	4284.98
21	Nusa Tenggara Barat	4628	4021	4098	2755	2797	3901	3700.17
22	Jambi	3914	3675	4513	3251	3186	3515	3675.67
23	Sulawesi tengah	3799	3358	4273	3265	2866	3014	3429.13
24	Sulawesi Utara	3986	3405	3268	2900	2761	3232	3258.60
25	Bali	3974	3146	3038	2157	2576	3258	3024.83
26	Maluku Utara	2666	2583	3194	2559	2868	3488	2893.00
27	Maluku	3224	3193	2842	2429	2825	2407	2820.12
28	DI Yogyakarta	2710	2853	3067	2290	2038	2069	2504.21
29	Kepulauan Riau	2105	2272	2778	1844	1784	2097	2146.69
30	Bengkulu	2446	2029	2467	1902	1578	1378	1966.67
31	Sulawesi Barat	1978	1666	1835	1421	1339	1500	1623.01
32	Kalimantan Utara	1965	1653	1538	1648	1241	1467	1585.15
33	Bangka Belitung	1607	1598	1822	1382	1370	1341	1519.85
34	Gorontalo	1270	1326	1339	1055	1200	1497	1281.16

Sumber : Direktorat Jendral Pajak Perimbangan Kementerian Keuangan (djppkkemenkeu.go.id)

Tabel diatas menunjukkan data perkembangan belanja modal dari tahun 2017 – 2022 di 34 Provinsi di Indonesia. Terjadi fluktuasi belanja modal selama periode 2017-2019 dengan peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun karna pandemi COVID-19. Situasi ini mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan PMK Nomor 24/PMK.02/2022 yang mengatur pengelolaan anggaran untuk menangani pandemi COVID-19. Dalam peraturan Menteri Keuangan ini, terdapat ketentuan terkait alokasi anggaran, perubahan dan pergeseran anggaran, serta proses pelaporan.. Sehingga pengalokasian belanja di fokuskan pada pembelian sarana dan prasarana kesehatan dan menghentikan Pembangunan yang tidak berhubungan dengan kesehatan.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut 4 Provinsi di Pulau Jawa menempati posisi teratas dalam distribusi belanja modal di Indonesia. Hal ini karena Pulau Jawa memiliki beberapa keunggulan seperti sebagai Pusat Pemerintahan dan Bisnis, sebagian besar kantor pemerintah pusat berlokasi di Jakarta, ibu kota Indonesia untuk saat ini masih berlokasi di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan pulau Jawa sebagai pusat kegiatan bisnis, perdagangan dan keuangan yang terpenting. Kemudian, infrastruktur di pulau Jawa lebih unggul daripada pulau lain di Indonesia. Ini mencakup jaringan jalan, Pelabuhan, bandara dan sistem transportasi yang lebih baik. Infrastruktur yang baik memudahkan pergerakan barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan bisnis.

Pulau Jawa juga memiliki jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan pulau lain di Indonesia, dengan merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2022, populasi di Pulau Jawa mencapai 154,34 juta jiwa (bps.go.id). Dengan banyaknya penduduk di Pulau Jawa maka pasar konsumen di Pulau Jawa pun besar sehingga meningkatkan investasi yang masuk ke Provinsi di Pulau Jawa. Dengan meningkatnya investasi yang masuk dari domestik dan mancanegara maka akan meningkatkan belanja modal. (Pangestu p et al., 2019) mengatakan pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pengalokasian Anggaran Belanja Modal oleh Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Untuk melihat dampak pendapatan daerah terhadap pewujudan belanja modal, dilakukan berbagai penelitian. (Sugiarthi & Supadmi, 2014) menunjukkan PAD, DAU, dan DBH berdampak pelaksanaan belanja modal, disamping itu DAK menunjukkan dampak yang dapat diabaikan. Demikian juga penelitian Sugiyanta (2016), DAK dan SiLPA dapat berpengaruh menguntungkan dalam meningkatkan belanja modal, namun DAU dan DBH tidak demikian.

Tabel 1.2 Provinsi dengan Belanja Modal Tertinggi

No	4 Provinsi Dengan Belanja Modal tertinggi (miliar rupiah)		
	Nama Provinsi	2021	2022
1	Jawa Timur	Rp14,922	Rp18,515
2	Jawa Barat	Rp15,530	Rp14,875
3	Jawa Tengah	Rp11,377	Rp13,231
4	DKI Jakarta	Rp 6,865	Rp 8,411

Berdasarkan tabel di atas, Jawa Barat pada tahun 2021 merupakan provinsi dengan belanja modal tertinggi ke 1 di Indonesia dengan total belanja modal sebesar Rp 15,193 triliun. Hal ini demi tercapainya optimalisasi realisasi percepatan belanja yang canangkan oleh Pemerintah Jawa Barat dari awal tahun, khususnya pada tahun sementara, realisasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat saat ini hingga 4,14 persen dibandingkan 4,95 persen untuk periode yang sama tahun lalu. Pada tahun 2022, terjadi penurunan belanja modal di Jawa Barat yang disebabkan oleh anggaran belanja keseluruhan Provinsi Jawa Barat hingga Rp169,6 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,9% tahun 2021 yang mencapai Rp169,81 triliun. Ini terjadi karena adanya penyaluran langsung BOS kepada Pemerintah Kabupaten, menyebabkan penurunan APBD Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat pada tahun 2022 mencatatkan kelebihan anggaran sebesar Rp2 triliun, yang terjadi karena pendapatan meningkat lebih tinggi daripada pengeluaran. Pada kuartal kedua tahun 2022 penyaluran belanja APBN di Jawa Barat mencapai 39,56% dari direncanakan. Sementara itu, belanja Pemerintah Jawa Barat pada kuartal ini mencapai Rp13,42 triliun atau 42,60%, lebih tinggi dari pada kuartal kedua tahun 2021 yang mencapai 38,69% dari pagu anggaran.

(<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Barat-Agustus-2022.aspx>).

Hal ini tentu saja menarik untuk dibahas, untuk mengetahui pengaruh variabel lainnya yang dapat mempengaruhi belanja modal di Jawa Barat agar Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan Kembali pada tahun selanjutnya dan realisasinya menjadi yang tertinggi di Indonesia.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS BELANJA MODAL

Dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran untuk membeli atau mengembangkan aset tetap berwujud yang bermanfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk kegiatan otonomi. Aset yang bersifat tetap ini mencakup tanah, peralatan dan mesin, struktur bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Pengeluaran modal adalah bentuk investasi publik yang terdiri dari perolehan aset tetap fisik dengan manfaat yang berlangsung lebih dari setahun. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan mengartikan belanja modal sebagai anggaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset dalam beberapa periode akuntansi. Hal tersebut termasuk pengeluaran untuk akuisisi aset seperti tanah, bangunan dan struktur, peralatan, kendaraan, dan aset lainnya.

Hubungan Sisa Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

(Nurlaela et al., 2018) SiLPA memiliki pengaruh pada belanja modal. Selain itu, (Sugiyanta, 2016) menunjukkan bahwa SiLPA berdampak besar kepada belanja modal pemerintah daerah. Data diatas menyimpulkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi pengeluaran anggarannya dengan menggunakan pendapatan surplusnya. Kelebihan dana tersebut akibat tindakan yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran, Akibatnya, alokasi belanja yang direncanakan dalam tahun anggaran tertentu baru dapat direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran berikutnya. Pemanfaatan SiLPA bertujuan untuk mengurangi dana yang tidak digunakan di rekening kas daerah yang digunakan untuk biaya pembangunan seperti pembangunan infrastruktur selain biaya operasional.

H1 : Sisa Anggaran (SiLPA)

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Riset memberitahu bahwa PAD secara cukup besar dapat meningkatkan belanja modal (Rumefi, 2018). Studi yang sama (Sugiarthi & Supadmi, 2014) memperlihatkan PAD secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi belanja modal. Selain mengindikasikan keefektifan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, ini juga tercermin dari peningkatan jumlah belanja yang didanai oleh daerah dengan memakai dana sendiri, hal ini memperlihatkan peranan PAD dalam mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur di Daerah.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, hasil pengelolaan kekayaan Pemda yang dipisahkan, pajak serta pendapatan lokal dan PAD lain yang diakui sebagai peningkat kekayaan bersih pada saat menghitung PAD. Pajak yang tidak tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak boleh dipungut oleh Pemda.

H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

(Permatasari & Mildawati, 2016) Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki dampak baik terhadap belanja modal. Semakin besar alokasi dana yang diterima oleh suatu daerah, kemampuan daerah tersebut untuk mengalokasikan belanja modal semakin tinggi. (Febriana & Praptoyo, 2015) mengkonfirmasi temuan serupa, yaitu Dana Alokasi Umum mempunyai dampak positif

terhadap Belanja Modal. Sebaliknya, (Wandira, 2013) mengatakan bahwa dampak DAU tidak signifikan.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mengatasi ketidakmerataan dalam penyalangan keuangan dari pembagian hasil bahan alam di suatu daerah. Besarannya sendiri ditetapkan minimal 25% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan oleh (APBN).

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU)

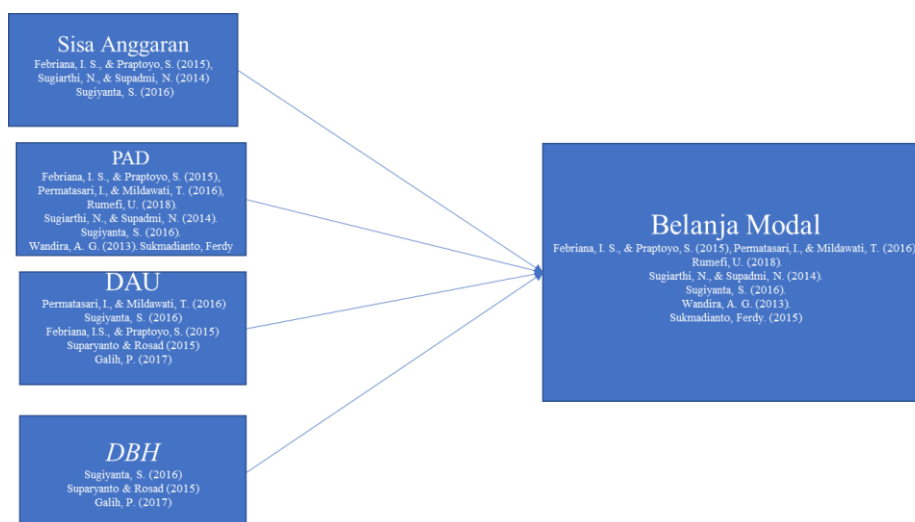
Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

(Permatasari & Mildawati, 2016) menyebutkan Dana Bagi Hasil memiliki dampak positif dan besar terhadap belanja modal, Jika daerah menerima DBH yang tinggi, maka alokasi belanja modal juga semakin tinggi. (Galih, 2017) mengatakan DBH berpengaruh baik terhadap belanja modal. Namun, (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) mengatakan Dana Bagi Hasil tidak memiliki dampak krusial terhadap belanja modal.

Dana Bagi Hasil diperoleh dari pendapatan khusus APBN, yang kemudian ditujukan kepada daerah penghasil ditinjau dari persentase tertentu. Maksud dari alokasi ini adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda.

Kerangka Pemikiran

Untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan Independent dapat dilihat dalam kerangka pemikiran, yakni :



Hipotesis :

H1: Sisa Anggaran berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal.

H2: PAD berdampak positif serta signifikan kepada Belanja Modal.

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

H4 : Dana Bagi Hasil memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan mtodologi kuantitatif dan teknik analisis regresi data panel. Penelitian ditujukan untuk mengestimasi pengaruh variabel independen seperti Sisa Anggaran, PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS), Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, jurnal

nasional dan internasional, serta penelitian terkait dari penelitian sebelumnya merupakan sumber data sekunder penelitian.

Tabel 1.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Notasi	Pengertian	Satuan	Sumber
Sisa Anggaran	Sisa Anggaran	“surplu anggaran dikurangi defisit anggaran dikurangi pembiayaan bersih. Penyusunan APBD, angka SILPA harus sama dengan nol.”	Miliar	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
Pendapatan Asli Daerah	PAD	“Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau pendapatan yang didapat Pemda dan diserap sesuai dengan Perda dan Perpu. Sebagai wujud desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberi wewenang kepada Pemda dalam pembiayaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.”	Miliar	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum	“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemda, bertujuan untuk mengurangi disparitas keuangan dan pelayanan publik di antara berbagai daerah.”	Miliar	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
Dana Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil	“Dana Bagi Hasil (DBH) yakni dana yang berasal dari pendapatan APBN, dan selanjutnya diberikan kepada Pemda untuk mendukung keperluan Pemda dalam implementasi desentralisasi.”	Miliar	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Metode Analisis

Analisa pada penelitian ini merupakan metode regresi data panel yang terdiri dari tiga model, yakni Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Secara sistematis ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 SiLPA_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DBH_{it}$$

Keterangan:

Y	: Belanja Modal
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien regresi variabel bebas
it	: Provinsi i pada periode t
SiLPA it	: Sisa Anggaran Provinsi I pada periode t
PAD it	: PAD Provinsi i pada periode t
DAU it	: Dana Alokasi Umum Provinsi i pada periode t
DBH it	: Dana Bagi Hasil Provinsi i pada periode t

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1.2 Hasil Pengujian Regresi

Variabel	Teori	β	P-Value (1 Tail)	Keputusan
Sisa Anggaran	+	0.354407	0.0037	H1 diterima***
PAD	+	0.185156	0.0006	H2 diterima ***
Dana Alokasi Umum	+	0.274252	0.0000	H3 diterima***
Dana Bagi Hasil	+	-0.536802	0.0357	H4 ditolak
Goodness Of Fit				
R-Square		0.579311		
Adj R- Square		0.561963		
F- statistik		33.39360		
Prob Statistik		0.000000		
Uji Pemilihan Model				
Chow Test		Chi- Square	32.936122	
		Prob	0.0075	
Hausman Test		Chi- Square	2.955799	
		Prob	0.5652	

Sumber : Data Diolah (Eview,s 9.0)

Keterangan : Tingkat Signifikansi ***1%;**5%; dan *10%

Uji Chow digunakan dalam pemilihan model yang tepat antara CEM atau FEM. Pada tabel terlihat bahwa Prob Chi-square yaitu senilai $0.0075 < 0.05$ berarti H_0 ditolak (H_a diterima) dan model yang tepat digunakan yaitu FEM. Hausman test dilakukan jika pada pengujian chow diperoleh kesimpulan model yang terpilih yaitu FEM. Hausman test digunakan dalam memilih model yang tepat yaitu REM atau FEM. Tabel di atas memperlihatkan bahwa Prob Chi-square yaitu senilai $0.5652 > 0.05$ mengartikan H_0 ditolak (H_a diterima) maka dari itu REM merupakan model yang tepat

Hasil Uji Goodness of fit berdasarkan penelitian di atas, koefisien determinasi sebesar 0,561963, ini memperlihatkan variabel independen pada penelitian dapat menyumbang 56,19 persen dari varian struktur modal. Sisanya 40,81 persen dapat dipertanggungjawabkan oleh variabel-variabel yang dikecualikan dari analisis ini. H_0 ditolak (H_a diterima), dengan ini dapat dinyatakan paling tidak salah satu variabel independen yaitu Sisa Anggaran, PAD, dan Dana0Perimbangan mempengaruhi Belanja Modal. Uji t digunakan dalam menguji pengaruh faktor-faktor independen yaitu Sisa Anggaran, PAD, dan Dana0Perimbangan terhadap variabel dependen yaitu Belanja0Modal.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sisa Anggaran terhadap Belanja Modal

Dari pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Sisa Anggaran senilai 0.354407; menandakan bila skor variabel independent lainnya tet, dan variabel Sisa Anggaran mendapat peningkatan senilai satu miliar rupiah, maka Belanja Modal mengalami peningkatan sebanyak 0.354407, ceteris paribus. Kemudian, Prob. t-stat untuk variabel Sisa Anggaran yang dihasilkan dalam model sebesar 0.0037 yang berarti Sisa Anggaran secara krusial mempengaruhi Belanja Modal di Indonesia. Ini sesuai dengan hipotesa yang ditentukan. Semakin besar sisa anggaran yang didapat, semakin besar pula belanja modal yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur, pembelian kebutuhan daerah, pembelian alat kesehatan, dan lain-lain. Sisa anggaran tersebut berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak terpakai, yang akan digunakan pada tahun berjalan. Menurut data yang diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan, sisa anggaran tahun 2020 akan defisit karena pemerintah akan menggunakan dana yang diperoleh dari dana perimbangan dan PAD untuk mendukung alat kesehatan, vaksin, dan layanan untuk pandemi Covid-19.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dari data memperlihatkan, koefisien regresi untuk variabel PAD adalah 0.185156 yang berarti jika skor untuk variabel independen lainnya dibuat konstan dan variabel PAD dinaikkan satu satuan (satu miliar rupiah), sehingga terjadi kenaikan belanja modal sebesar 0.185156, semuanya dianggap sama. Kemudian t-stat untuk variabel PAD yang dihasilkan oleh model kemungkinan sebesar 0.0006 ini memperlihatkan, PAD berpengaruh pada Belanja Modal Indonesia. Temuan ini sesuai dengan hipotesa yang ditentukan.

PAD bersumber dari potensi yang dimiliki daerah; akibatnya, pendapatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan di tahun 2020 karena lesunya daya beli masyarakat selama pandemi dan banyak bisnis lokal yang bangkrut. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi potensinya, maka daerah tersebut harus terus dimaksimalkan agar dapat terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi suatu provinsi. Jawa Barat memiliki banyak keunggulan, mulai dari daya tarik wisatanya, hingga produk berkualitas ekspor yang dihasilkan di setiap daerahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pengolahan data memperlihatkan bahwa koefisien regresi untuk variabel DAU yakni 0.274252 yang artinya jika skor untuk variabel independen lainnya dibuat konstan dan variabel DAU dinaikkan satu satuan (satu miliar rupiah), maka peningkatan belanja modal sebesar 0.274252, semuanya dianggap sama. Kemudian t-stat untuk variabel DAU yang dihasilkan oleh model kemungkinan sebesar 0.0000, ini memperlihatkan bahwa DAU berpengaruh krusial pada Belanja Modal Indonesia. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang ditentukan

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki dasar hukum, terdiri dari UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005. Pasal 1 poin 21 UU Nomor 33 Tahun 2004, DAU merujuk pada dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan kepada Pemda. Bertujuan meratakan kemampuan keuangan di antara daerah, mendukung pembiayaan kebutuhan Pemda, dan mendorong praktik desentralisasi. Penggunaannya sepenuhnya diberikan kepada Pemda sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah, dikenal sebagai konsep block grant. Formula DAU dirancang untuk menghitung potensi penerimaan daerah dan kebutuhan fiskal daerah.

Melalui formula tersebut, pemerintah pusat dapat menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk menutup kesenjangan fiskal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Pengolahan data memperlihatkan koefisien regresi untuk variabel DBH adalah -0.536802 yang berarti jika skor untuk variabel independen lainnya dibuat konstan dan variabel DAU dinaikkan satu satuan (satu miliar rupiah), maka penurunan belanja modal sebesar -0.536802, semuanya dianggap sama. Kemudian t-stat untuk variabel DBH yang dihasilkan oleh model kemungkinan sebesar 0.0357, ini memperlihatkan bahwa DBH berpengaruh krusial pada Belanja Modal Indonesia.

Hasil penelitian DBH berpengaruh negatif hal ini tidak sejalan dengan hipotesa yang ditetapkan. Pemerintah memberikan Dana Bagi Hasil untuk menyeimbangkan hubungan antara pemerintah pusat dan Pemda. Jika dampaknya bersifat negatif, keseimbangan tersebut tidak terwujud. Berarti bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil, maka belanja modal akan mengalami penurunan

Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada Pemda untuk membiayai kebutuhan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan DBH untuk meningkatkan kesejajaran antara pemerintah pusat dan Pemda, dengan mengamati potensi pendapatan daerah. Pembagian DBH berdasarkan prinsip "by origin", yang mengacu pada asal-usul pendapatan tersebut. Pengalihan DBH dilakukan sesuai dengan prinsip "Based on Actual Revenue", yang berarti pembagian DBH didasarkan pada realisasi penerimaan dalam tahun anggaran yang berlangsung, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 33 Tahun 2004. Jenis-jenis DBH mencakup DBH Pajak, yang melibatkan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Cukai Hasil Tembakau, serta DBH Sumber Daya Alam, yang mencakup Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, dan Perikanan.

Kesimpulan

Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak Sisa Anggaran, PAD, DAU dan DBH atas Belanja Modal. Hasil analisis regresi linier berganda pada data panel menunjukkan bahwa Sisa Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, PAD memberikan pengaruh baik dan signifikan terhadap Belanja Modal, DAU memiliki pengaruh baik dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DBH memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pemerintah harus mengevaluasi sisa anggaran, PAD, dan DAU jika ingin menggenjot Belanja Modal. Berdasarkan hasil DBH berpengaruh negatif maka, DBH harus diturunkan anggarannya agar belanja modal di Provinsi Jawa Barat meningkat. Ada variabel lain yang berpengaruh terhadap belanja modal, seperti luas wilayah, desentralisasi fiskal dan kebijakan pemerintah lainnya (Nurlaela et al., 2018) yang tidak dibahas oleh penulis artikel ini.

Referensi

- Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 1–22.
- Galih, P. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah

- Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/51410/>
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29
- Nurlaela, C., Hidayati, N., & Mahsuni, A. W. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *E-Jra*, 07(10), 119–131.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–17.
- Rumefi, U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 122–130.
- Sugiarthi, N., & Supadmi, N. (2014). Pengaruh Pad, Dau, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2), 477–495.
- Sugiyanta, S. (2016). Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.19184/jauj.v14i1.2504>
- Sukmadianto, Ferdy. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten-Kota se-Wilayah Provinsi Jawa Timur (Tahun 2009-2013). Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–51.